

APA DAN BAGAIMANA INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II

**Australian
Aid** 



APA DAN BAGAIMANA
INDEKS
MASYARAKAT
SIPII

SEBUAH PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI
INDEKS MASYARAKAT SIPII (IMS)

PENYUSUN:
RONNY MALELAK

EDITOR:
SUGIARTO A. SANTOSO

YAPPIKA
Jakarta, Februari 2014

APA DAN BAGAIMANA INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Panduan Praktis Memahami Indeks Masyarakat Sipil

Cetakan Pertama, Februari 2014

viii, 10.5 x 17 cm

Penyusun : Ronny Malelak

Editor : Sugiarto A. Santoso

Tata Letak : Moelanka

Cover : Moelanka

Diterbitkan oleh:

YAPPIKA

Jl. Pedati Raya No.20 RT07/09, Jakarta Timur 13350,
Telp: 021-8191623 Fax: 021-85905262, 021-85000670,
E-mail: yappika@indosat.net.id, www.yappika.or.id

KATA PENGANTAR

YAPPIKA

(Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokratis)

Buku saku ini lahir dalam merespon pertanyaan yang berkembang di seputar wacana masyarakat sipil dimana cukup penting adanya dokumentasi yang ringkas dan mudah dimengerti terkait konsep masyarakat sipil dan indeks masyarakat sipil. Buku saku ini telah berusaha sedapat mungkin menjawabnya dengan pendekatan penulisan Q & A. Pendekatan ini diharapkan dapat memudahkan para pembaca yang berminat memahami konsep indeks masyarakat sipil. Namun demikian disadari bahwa penyusunan buku saku ini berbasis pada pengetahuan dan pengalaman YAPPIKA dalam melaksanakan pengukuran IMS sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat informasi yang belum dapat terjelaskan. Sumber lainnya juga berasal dari konsep CIVICUS. Oleh karena itu masukan untuk perbaikan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Buku saku ini merupakan salah satu produk dari beberapa produk yang dihasilkan YAPPIKA dalam memahami masyarakat sipil dan indeks masyarakat sipil. Produk-produk lainnya yaitu panduan dalam melakukan pengukuran IMS, hasil-hasil IMS tahun 2012, infosheet, brosur dan film. Keseluruhan produk tersebut diharapkan dapat memperkuat dan memperluas pengetahuan masyarakat dari berbagai kalangan atas pentingnya masyarakat sipil dalam membangun tatanan yang demokratis. Buku saku ini diharapkan dapat mengisi pada sisi praktis memahami masyarakat sipil dan indeks masyarakat sipil.

Pada akhirnya buku saku ini diharapkan menjadi pemantik diskusi dalam mewacanakan pentingnya peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam tatanan negara yang demokratis.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (Yappika)	ii
Daftar Isi	iv
I KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN...	1
1.1. Apa itu Masyarakat Sipil?	1
1.2. Masyarakat Sipil: Arena vs Entitas?	6
1.3. Bagaimana 'Arena' dalam Praktiknya?	7
1.4. Mengapa MS lebih Sesuai Dimaknai Sebagai Arena	8
1.5. Apa peran pentingnya Masyarakat Sipil?	9
2 MENGENAL	
INDEKS MASYARAKAT SIPIL	13
2.1. Apa itu Indeks Masyarakat Sipil?	13
2.2. Bagaimana Pendekatan yang Digunakan dalam IMS?	14
2.3. Apa Prinsip Utama Pengukuran IMS?	16
2.4. Seperti Apa Kerangka Analisisnya?	17

2.5.	Bagaimana Melakukan Penilaian/Skoring?	31
2.6.	Siapa Saja Partisipan Pengukuran IMS?	32
2.7.	Pentingnya Keterwakilan Dalam Pengukuran IMS?	33
2.8.	Apa Informasi Pendukung yang Dibutuhkan?	35
2.9.	Bagaimana proses Pengukuran IMS?	36
2.10.	Siapa Saja yang Dapat Melaksanakan IMS?	38

3	MANFAAT INDEKS MASYARAKAT SIPIL	39
3.1.	Manfaat IMS bagi Sektor Swasta	39
3.2.	Manfaat Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Nasional ?	40
3.3.	Manfaat Bagi OMS	40

4	BELAJAR DARI PENGALAMAN	43
4.1.	Apa saja Pengalaman yang Diperoleh YAPPIKA	43
4.2.	Apa tantangan penggunaan IMS?	45
4.3.	Apa yang Penting Dilakukan ke Depan?	46

	DAFTAR BACAAN	47
--	----------------------------	-----------

Bagian I

KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN

Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Indeks Masyarakat Sipil, mari kita terlebih dahulu memahami bersama konsep-konsep dasar dan pengertian terkait dengan masyarakat sipil.

I.1. Apa itu Masyarakat Sipil?

Masyarakat sipil (*civil society*) adalah sebuah konsep yang telah lama berkembang dan hingga kini menjadi bahan diskusi dan perdebatan hangat secara terus menerus. Selama masa perkembangannya, bermunculan beragam pandangan yang berupaya memberikan batasan pengertian “apa itu masyarakat sipil”. Berbagai teori dikemukakan oleh banyak pihak, beberapa diantaranya memiliki pandangan yang sama dan saling mendukung, ada pula yang memberikan kritik terhadap pandangan-pandangan tersebut. Namun demikian, semua pandangan dan argumentasi yang berkembang itu berupaya untuk menjelaskan “apa itu masyarakat sipil”.

Dalam buku ini pengertian masyarakat sipil mengacu pada yang dikembangkan oleh CIVICUS, sebuah organisasi internasional pemerhati perkembangan masyarakat sipil di berbagai negara (lihat <https://civicus.org/ý>). CIVICUS mendefinisikan masyarakat sipil sebagai:

“Sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama”¹.

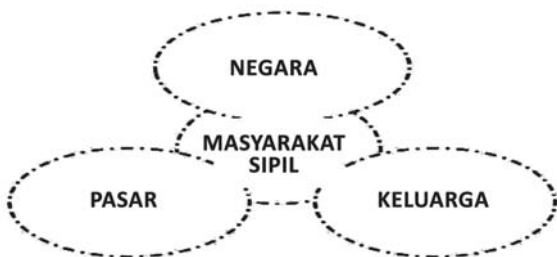
Definisi di atas dapat dijelaskan dengan beberapa kata kunci, yakni:

- **Arena** dimaksudkan sebagai ruang publik di mana individu-individu bertemu, berkumpul, berdiskusi dan berdebat untuk mempengaruhi perkembangan masyarakat yang lebih luas. Arena menekankan pada pentingnya peran aktor-aktor masyarakat sipil dalam memperluas ruang publik yang mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu. Di dalam arena juga terkandung pengertian yang lebih luas yang tidak membatasi aktor-aktor masyarakat sipil hanya kepada organisasi-organisasi yang formal tetapi juga kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan informal di dalam masyarakat².

¹ CIVICUS *Civil Society Index – Toolkit, Implementation Phase 2003-2004*, halaman xvii

² Ibid.

- **Batasan yang samar.** Konsep masyarakat sipil memisahkan antara sektor masyarakat sipil, negara, pasar, dan keluarga. Disadari dalam prakteknya bahwa batasan antara keempat sektor arena tersebut memang samar (tidak memiliki batas yang jelas). Lihat gambar di bawah ini.



Istilah samar dapat dijelaskan dengan garis putus-putus yang melingkupi antara masyarakat sipil, negara, pasar, dan keluarga). Mengapa samar? *Pertama*, ada kemungkinan adanya overlap antar arena yang berbeda. Sebagai contoh, koperasi memiliki basis mencari keuntungan, dan di saat bersamaan juga mendorong nilai-nilai kebersamaan. Koperasi adalah bentuk organisasi overlap antara fungsi dalam masyarakat sipil dan pasar. *Kedua*, IMS menggunakan perspektif fungsionalis, yang memandang keanggotaan dalam masyarakat sipil atas dasar fungsi yang

disandang oleh seseorang ketika melakukan suatu kegiatan, ketimbang basis organisasi yang diikutinya. Artinya, seorang aktor dapat bergerak dari satu arena/ruang ke arena/ruang lain (atau menjadi bagian dari dua arena/ruang pada saat yang berdekatan), berdasarkan jenis atau fungsi kegiatan mereka. Sebagai contoh: sebuah perusahaan swasta yang berproses mencari keuntungan jelas beraksi dalam ruang pasar. Perusahaan swasta yang sama, yang sedang menjalankan aktivitas kedermawanan (misalnya menyelenggarakan malam dana untuk amal kemanusiaan), di sisi lain, dapat dikategorikan menjalankan peran di dalam ruang masyarakat sipil. Dengan demikian, kerangka pandang ini mereduksi tekanan pada bentukan organisasi dan memperluas fokus pada fungsi dan peran yang dimainkan oleh asosiasi informal, gerakan-gerakan, dan bentuk-bentuk aksi kolektif warga-negara lain yang terkoordinir (terorganisir) namun tidak berbentuk organisasi.

- **Keluarga** adalah ranah domestik dari kehidupan rumah tangga yang bersifat privat. Beberapa hal dalam ranah domestik ini dapat menjadi persoalan publik. Salah satu contohnya adalah kekerasan dalam rumah

tangga. Sektor keluarga tidak termasuk dalam MS yang lebih menekankan pada aksi-aksi di ruang publik. Apabila keluarga-keluarga membentuk asosiasi beraktivitas di ruang publik, seperti berbagai paguyuban keluarga misalnya, maka dapat dikategorikan sebagai bagian dari MS.

- **Negara** adalah organisasi kekuasaan yang menyanggah monopoli penggunaan kekuasaan secara legal untuk mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan, termasuk wewenang untuk menggunakan kekerasan. Oleh karenanya sektor negara bukan sektor masyarakat sipil.
- **Pasar** atau sektor swasta adalah ruang di mana anggota-anggota masyarakat bertemu untuk memperoleh penghasilan, mendapat keuntungan dan kekayaan melalui proses produksi atau pertukaran barang dan jasa, dan lain-lain. Karena motifnya adalah untuk mencari keuntungan maka pasar tidak termasuk dalam definisi masyarakat sipil.
- **Berkelompok** adalah kekuatan utama dari masyarakat sipil yang terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi dan interrelasi antara satu dengan yang lain maupun dengan pihak lainnya.

- **Mendorong “kepentingan” bersama** diartikan secara luas yang dapat berupa promosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi lainnya.

Definisi CIVICUS ini selanjutnya dipandang sebagai definisi operasional yang digunakan untuk melihat kondisi masyarakat sipil, melalui sebuah alat yang disebut Indeks Masyarakat Sipil (IMS). Definisi ini dikembangkan CIVICUS dengan tujuan untuk memberikan ruang yang seluas mungkin dalam memotret realitas masyarakat sipil, termasuk keragaman yang ada di dalamnya, untuk perbaikan kondisi ke arah yang ideal.

1.2. Masyarakat Sipil: Arena vs Entitas?

Dalam realitasnya, masyarakat sipil dapat dipahami menurut dua cara pandang yaitu masyarakat sipil sebagai entitas dan masyarakat sipil sebagai arena (ruang). Masyarakat sipil sebagai entitas mengarah pada basis ‘organisasi’, sedangkan masyarakat sipil sebagai arena lebih berbasis pada ‘fungsi’ ketika sekelompok orang melakukan suatu kegiatan.

Masyarakat sipil sebagai entitas ditandai oleh adanya isu-isu penting yang dikerjakan, ada aktor-aktor yang berkumpul, ada kegiatan, ada hasil kerjanya dan perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kerja-

kerjanya. Sedangkan masyarakat sipil sebagai arena/ ruang, ditandai oleh adanya isu-isu penting yang didiskusikan, aktor-aktor, dan ruang-ruang berdiskusi (bertukar pikiran atau berdialog). Ruang ini dimanfaatkan untuk berbagi pembelajaran dan strategi bahkan berdebat untuk mendukung kerja-kerjanya atau aksi-aksinya bagi kepentingan publik yang lebih luas. Dalam arena ini terjalin kerja-kerja kolaborasi antar aktor yang terjadi sebagai hasil interaksi-interaksi.

1.3. Bagaimana ‘Arena’ dalam Praktiknya?

Seperti dikatakan di atas bahwa CIVICUS memandang Masyarakat Sipil sebagai arena, yakni sebuah ruang yang bebas dimasuki oleh berbagai aktor, tidak hanya aktor-aktor (pelaku/pihak) yang ‘beradab’ (*civilized*) tetapi juga terbuka untuk dimasuki para aktor yang *uncivilized*. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa CIVICUS memandang Masyarakat Sipil diisi oleh aktor yang tidak homogen, tetapi lebih merupakan arena yang kompleks di mana nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda berinteraksi sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi benturan kepentingan di dalamnya.

Dalam praktiknya ‘arena’ lebih mengarah sebagai arena politik daripada arena ekonomi. Arena politik yang dimaksud bukan ranah politik praktis kepartaian tetapi lebih memfokuskan perhatian dalam aksi publik (relasi, interaksi, kontestasi) dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih luas. Perspektif politis terhadap masyarakat sipil ini mengarah pada tinjauan atas “relasi kekuasaan”, baik di dalam arena masyarakat sipil sendiri, maupun di antara masyarakat sipil dengan negara dan pasar.

1.4. Mengapa MS Lebih Sesuai Di maknai Sebagai Arena?

Menyambung penjelasan sebelumnya, *pertama*, apabila memilih MS sebagai entitas atau ‘organisasi’ maka definisi ini tidak dapat menyertakan aksi-aksi kolektif informal atau lainnya yang bersifat sementara (*ad hoc*). Misalnya, kelompok demonstrasi jalanan atau anggota kelompok-kelompok informal lainnya.

Kedua, definisi MS yang memfokuskan perhatian pada ‘organisasi’ cenderung mengarahkan penilaian tentang situasi masyarakat sipil pada jumlah dan bentuk organisasi, dibandingkan dengan menitikberatkan pada aksi publik secara bersama. Sebagai implikasinya, disadari dengan memilih

‘arena’ maka batas antara satu arena dengan arena lainnya tidak betul-betul tegas (samar) karena terdapat tumpang tindih antara arena-arena yang berbeda.

1.5. Apa peran pentingnya Masyarakat Sipil?

Peran penting masyarakat sipil semakin diyakini sebagai sebuah keniscayaan bahwa dia merupakan salah satu aktor penting dalam pencapaian pembangunan dan demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini dan terus akan berlangsung dimasa-masa mendatang. Peran dan kontribusi masyarakat sipil dapat dilihat pada dua aras, yakni aras lokal maupun aras nasional. Pada kedua aras ini, aktor-aktor masyarakat sipil berperan penting dalam memperluas ruang publik di mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu untuk mendorong kepentingan bersama.

Pada aras lokal, masyarakat sipil telah memainkan peran pentingnya mendorong demokratisasi seperti berhasil didokumentasikan oleh YAPPIKA dan telah diterbitkan dalam pada tahun 2011 dalam bentuk buku Indeks Masyarakat Sipil 2009. Dalam buku itu dipaparkan bahwa organisasi masyarakat sipil di 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur telah berperan dan berkontribusi dalam

mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong tata pemerintahan yang demokratis (TKLD). Partisipasi aktif masyarakat sipil nampak dalam perencanaan & penganggaran partisipatif; pelayanan publik; pendidikan dan pemberdayaan warga; meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat; dan pengawasan terhadap pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel³.

Pada aras ini nampak pula munculnya inisiatif masyarakat sipil untuk mengembangkan berbagai forum lintas aktor (FLA atau sebutan sejenis lainnya) sebagai ruang pertautan dinamis antar aktor di tingkat kabupaten/kota. Para aktor dalam forum ini berhasil menumbuhkan keyakinan bersama, , mempraktekkan, dan mempromosikan TKLD sebagai proses dan cita-cita kehidupan yang lebih baik bagi semua. Masyarakat sipil berperan aktif mempengaruhi kebijakan publik, mendorong akuntabilitas sektor negara dan pasar, serta melakukan pemberdayaan warga. Sedangkan negara memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, dan pihak pasar memberikan ruang bagi masyarakat

³ Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis, Indeks Masyarakat Sipil 16 Kabupaten/Kota, Yappika-ACCESS Phase II-AusAID, 2011.

untuk meningkatkan taraf hidupnya yang berorientasi pada pemberdayaan dan HAM.

Di tingkat nasional, MS juga telah berperan dalam mendorong perubahan sistem politik dan kebijakan secara signifikan. Masyarakat sipil aktif memberikan kontribusi pada sistem politik elektoral pemilihan umum multipartai dan pemilihan langsung legislatif pusat dan daerah, presiden, dan kepala daerah.

Terkait upaya masyarakat sipil mendorong perubahan kebijakan tampak oleh lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti:

- a) UU RI No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b) UU RI No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; saat ini telah diamandemen dengan UU RI No. 12/2011.
- c) UU RI No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) UU RI No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- e) UU RI No. 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- f) UU RI No. 14/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan

- g) UU RI No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- h) dan lain sebagainya.

Upaya masyarakat sipil mendorong perubahan kebijakan ditandai pula oleh hadirnya beberapa lembaga negara baru, seperti Ombudsman, KPK, Komnas HAM, dan Komisi Informasi.

Selain itu, MS juga telah berperan penting dalam memperjuangkan jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, mendorong kebijakan untuk memulihkan kebebasan warganegara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang menjadikan sektor masyarakat sipil tumbuh pesat dan semakin menguatkan peran-peran masyarakat sipil dalam proses-proses tata pemerintahan dan pembangunan.

Bagian 2

MENGENAL INDEKS MASYARAKAT SIPIL

2.1. Apa itu Indeks Masyarakat Sipil?

IMS didefinisikan sebagai sebuah alat untuk melakukan penilaian kebutuhan dan menyusun rencana aksi secara partisipatif, dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan momentum bagi inisiatif penguatan masyarakat sipil. Penjelasan ini merupakan konsep dinamis atas rangkaian pengalaman reflektif Yappika dalam melakukan pengukuran IMS di beberapa kabupaten/kota yang berada di empat provinsi kawasan timur Indonesia (Sulawsi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur). Pemanfaatan IMS dapat menyentuh dua hal. Pertama, bagi masyarakat sipil hasil pengukuran IMS dapat dijadikan bahan refleksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam hal struktur, nilai dan dampak sebagai upaya yang dilakukan masyarakat sipil. Kedua, bagi pencapaian cita-cita kabupaten/kota hasil IMS dapat menjadi petunjuk dalam menyusun perencanaan

pembangunan yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat. IMS merupakan alat yang memungkinkan untuk menangkap realitas MS secara utuh (termasuk sisi “gelap atau lemahnya” MS) dan berusaha untuk mencari upaya-upaya bagi penguatan Masyarakat Sipil tersebut agar mencapai kondisi masyarakat sipil yang sehat.

2.2. Bagaimana Pendekatan Yang Digunakan dalam Pengukuran IMS?

Secara metodologi, ada 2 (dua) macam pendekatan atau cara untuk melakukan penilaian status atau “tingkat kesehatan” Masyarakat Sipil, yaitu pendekatan berbasis persepsi dan pendekatan berbasis data kuantitatif. Pendekatan persepsi dimanfaatkan untuk menggali indikator-indikator melalui kegiatan lokakarya yang bersumber dari para pihak. Para pihak yang dimaksud, yaitu sekelompok tokoh masyarakat sipil, stakeholder kunci masyarakat sipil, dan orang-orang yang dipilih dan dipercayai oleh masyarakat miskin dan termarginalisasi. Orang-orang yang terpilih menjadi peserta lokakarya dianggap cukup memiliki pengalaman, kecakapan dan pengetahuan tentang sektor masyarakat sipil (baik sebagai pengamat maupun praktisi), sehingga layak menjadi sampel untuk merepresentasikan kondisi masyarakat sipil di sebuah wilayah.

Pendekatan kuantitatif dimanfaatkan juga dalam melakukan penilaian atas fakta-fakta yang didapat dalam lokakarya IMS. Sebelum dilakukan penilaian dengan menggunakan teknik kuantitatif dilakukan serangkaian metodologi penggalian data. Serangkaian penggalian data tersebut yaitu pengumpulan data-data sekunder tentang masyarakat sipil, analisis media, konsultasi dengan stakeholder, menggali fakta (*fact finding*), dan konsultasi dengan komunitas. Seluruh data yang terkumpul dituliskan berdasarkan setiap indikator IMS. Data-data inilah yang kemudian menjadi basis untuk pengukuran IMS di suatu wilayah.

Apabila kedua pendekatan tersebut disinergikan, maka dibutuhkan data-data dasar (dalam bentuk numerik maupun deskripsi) tentang berbagai aspek Masyarakat Sipil yang akan ditelaah, yang dapat digali dari sumber-sumber hasil penelitian tentang Masyarakat Sipil yang pernah ada, atau melakukan sendiri sebuah penelitian yang komprehensif mengenai masyarakat sipil di sebuah wilayah. Banyak sekali keuntungan yang bisa diraih, bila para pihak yang dilibatkan untuk melakukan penilaian atas dasar persepsi mereka, dapat menguji kembali persepsi tersebut dengan sehimpuan data kuantitatif dan kualitatif, yang bisa dikumpulkan oleh seorang/sekelompok peneliti.

2.3. Apa Prinsip Utama Pengukuran IMS?

Prinsip utama yang digunakan dalam pengukuran IMS adalah prinsip partisipatif. Dalam arti, proses pengukuran IMS ini melibatkan secara aktif para aktor masyarakat sipil dan stakeholder kunci lainnya dalam proses pengukuran IMS. Mereka memberikan pandangan, pikiran dan pendapatnya tentang kondisi atau realitas yang terjadi di wilayahnya untuk proses pengukuran IMS.

Partisipasi para aktor sangat penting mengingat IMS bukanlah hanya berorientasi kepada pengumpulan informasi semata, namun merupakan riset aksi yang bertujuan untuk berkontribusi pada penguatan masyarakat sipil⁴. Holloway (2001) menyebutkan bahwa Indeks Masyarakat Sipil bukanlah merupakan riset dengan metoda konvensional, melainkan sebuah inisiatif riset-aksi yang melibatkan banyak pihak dalam:

- Mendialogkan pertanyaan mendasar tentang ‘apa itu masyarakat sipil?’ dan ‘bagaimana seharusnya masyarakat sipil yang sehat?’;
- Mengidentifikasi indikator-indikator yang

⁴ CIVICUS Civil Society Index Toolkit. Implementation Phase 2003 – 2004. Halaman viii

esensial yang memungkinkan kita untuk menilai tindakan dan nilai-nilai yang dianut oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) secara komprehensif;

- Menganalisis jurang perbedaan antara ‘realitas’ masyarakat sipil dan tingkat kesehatannya kini, dengan berbagai perubahan/perbaikan yang dibutuhkan untuk mencapai status ideal masyarakat sipil;
- Memperjelas agenda perubahan, dengan sebuah konsensus tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki.

2.4. Seperti Apa Kerangka Analisisnya?

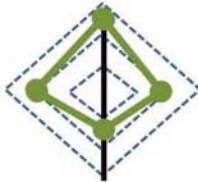
Kerangka analisis IMS menggunakan kerangka analisis ‘intan’ yang dikelompokkan dalam 4 dimensi. Keempat dimensi tersebut masing-masing adalah: struktur, lingkungan, nilai dan dampak. Dimensi ini terbagi dalam 25 subdimensi dan terdiri atau mencakupi 74 indikator. Dalam bentuk diagram, kerangka analisis ‘intan IMS’ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. STRUKTUR

- 1.1 Keluasan partisipasi warga
- 1.2 Kedalaman partisipasi warga
- 1.3 Keragaman arena MS
- 1.4 Tingkat Organisasi
- 1.5 Relasi antar aktor-aktor MS
- 1.6 Sumber daya

2. LINGKUNGAN

- 2.1 Konteks politik
- 2.2 Kebebasan dan hak-hak dasar
- 2.3 Konteks sosial-ekonomi
- 2.4 Konteks sosial-budaya
- 2.5 Hukum & kebijakan
- 2.6 Relasi negara - MS
- 2.6 Relasi negara - MS
- 2.7 Relasi pasar - MS



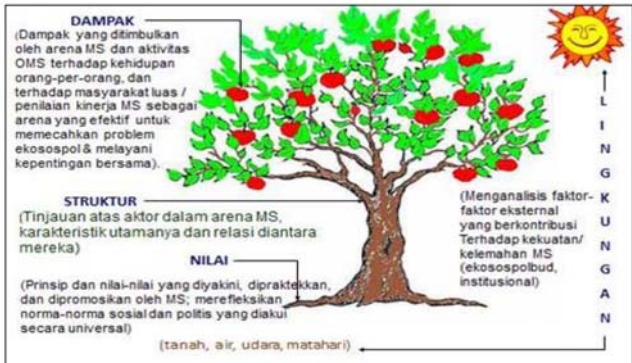
3. NILAI

- 3.1 Demokrasi
- 3.2 Transparansi
- 3.3 Toleransi
- 3.4 Anti-kekerasan
- 3.5 Kesetaraan gender
- 3.6 Penanggulangan kemiskinan
- 3.7 Keberlanjutan lingkungan

4. DAMPAK

- 4.1 Mempengaruhi kebijakan publik
- 4.2 Mendesakkan terwujudnya tanggung jawab pemerintah & perusahaan swasta
- 4.3 Respon terhadap kepentingan sosial
- 4.4 Pemberdayaan warga
- 4.5 Pemenuhan kebutuhan sosial

Alat analisis empat dimensi ini dapat diilustrasikan dengan analogi masyarakat sipil sebagai sebuah pohon, seperti gambar berikut:



Uraian dari masing-masing Dimensi dan Subdimensi IMS adalah sebagai berikut:

- **Dimensi Struktur**



Dimensi ini berbicara mengenai aktor-aktor di dalam arena MS, karakteristik utamanya dan relasi diantara mereka. Dimensi ini terdiri dari 6 subdimensi dan 21 indikator, yakni:

- 1) *Keluasan partisipasi warga* menilai prosentase/jumlah warga yang terlibat dalam aktivitas MS. Indikator-indikatornya mencakup; persentase warga yang mengambil bagian dalam aksi politik, donasi amal, menjadi anggota OMS, melakukan kerja relawan dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat.

- 2) *Kedalaman partisipasi warga* menilai seberapa sering/banyak orang terlibat dalam aktivitas MS. Indikator-indikatornya mencakup; berapa sering/banyak orang menyumbang untuk amal, seberapa sering kerja relawan mereka lakukan dan seberapa banyak mereka menjadi anggota OMS yang berbeda.
- 3) *Keberagaman MS* menilai keragaman OMS di dalam arena masyarakat sipil. Apakah semua kelompok sosial berpartisipasi secara setara dalam arena MS? Apakah ada kelompok yang dominan atau yang tersisihkan? Indikator-indikatornya mencakup partisipasi perempuan, kelompok minoritas dan kelompok sosial lain dalam kepemimpinan dan keanggotaan OMS. Juga melihat keberadaan OMS di daerah pedesaan atau region-region tertentu
- 4) *Tingkat organisasi* menilai infrastruktur yang dimiliki MS berkaitan dengan stabilitas dan kematangannya, serta kapasitasnya untuk melakukan aksi bersama. Indikator-indikatornya mencakup; eksistensi dan keefektifan lembaga paying, usaha untuk mem-

perbaiki diri sendiri, tingkat dukungan, dan jaringan internasional.

- 5) *Relasi antar OMS* menilai ikatan dan hubungan kerjasama diantara aktor-aktor MS. Indikator-indikatornya mencakup; sharing informasi dan pengembangan jaringan/alianasi
- 6) *Sumber daya (resources)* menilai kapasitas sumberdaya yang dimiliki OMS untuk mencapai tujuannya. Indikator-indikatornya mencakup; sumber daya finansial, manusia dan teknologi

- **Dimensi Lingkungan**



Dimensi lingkungan melihat berbagai faktor luar yang berpengaruh atau memberikan kontribusi bagi perkembangan ke arah

masyarakat sipil yang kuat, atau sebaliknya. Dimensi ini dibagi ke dalam 7 subdimensi dengan jumlah indikator 23, yakni:

- 1) *Konteks politik* menilai berbagai situasi politik dalam negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya mencakup; hak politik warga negara, tingkat kompetisi politik, aturan hukum, korupsi, keefektifan negara dan desentralisasi.
- 2) *Kebebasan dan hak dasar* menilai hak-hak konstitusional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sipil. Sejauhmana kebebasan dan hak ini dijamin oleh hukum dan dilaksanakan dalam prakteknya. Indikator-indikatornya mencakup; kebebasan sipil dan politik (kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan berorganisasi), kebebasan pers dan hak-hak atas informasi.
- 3) *Konteks sosial ekonomi* menilai situasi sosial ekonomi dalam negara dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya mencakup; kemiskinan yang meluas, perang sipil atau konflik, krisis ekonomi, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan tingkat buta huruf.

- 4) *Konteks sosial budaya* menilai seberapa jauh norma-norma sosial budaya berpengaruh terhadap masyarakat sipil. Indikator-indikatornya mencakup; tingkat kepercayaan, toleransi, budaya patriarki, feodalisme dan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum
- 5) *Hukum dan aspek legal* menilai sejauh mana hukum dan aspek legal berpengaruh terhadap masyarakat sipil (mendorong tumbuh-kembangnya atau justru malah mematikan). Indikator-indikatornya mencakup; prosedur registrasi OMS, hambatan legal pada aktivitas advokasi OMS, aturan pajak dan filantropi
- 6) *Relasi negara dan masyarakat sipil* menilai sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan negara. Indikator-indikatornya mencakup; otonomi OMS, dialog dan kerja sama antara OMS dan negara
- 7) *Relasi pasar dan masyarakat sipil* menilai sifat dan kualitas relasi antara masyarakat sipil dengan pasar. Indikator-indikatornya mencakup; sikap sektor swasta terhadap OMS, tanggung jawab social perusahaan

(*corporate social responsibility*) dan kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*).

● Dimensi Nilai



Dimensi nilai memfokuskan perhatian pada prinsip dan nilai-nilai yang dianut, dipraktekkan dan dipromosikan oleh masyarakat sipil. Berbeda dari dimensi-dimensi lain, aspek ini tidak mendapatkan banyak perhatian dalam literatur yang ada, sebagian karena dalam banyak konseptualisasi, nilai-nilai MS sebelumnya didefinisikan sebagai positif, progresif atau demokratis karena definisi MS yang dipilih. Subdimensi yang dipilih merefleksikan satu satuan norma sosial dan politik yang diterima secara universal (contohnya

Deklarasi HAM). Indikator melihat baik pada bagaimana nilai-nilai ini dipraktekkan dalam MS dan upaya-upaya MS untuk meningkatkan nilai-nilai dalam masyarakat luas. Dimensi ini terdiri dari 7 subdimensi dengan 14 indikator, yaitu:

- 1) *Demokrasi* menilai sejauhmana aktor-aktor MS mempraktekkan demokrasi di dalam internal organisasi mereka, dan seberapa aktif OMS mempromosikan demokrasi kepada publik. Indikator-indikatornya mencakup; praktek-praktek demokrasi dalam OMS (misalnya memilih pemimpin dan membuat keputusan), dan aksi-aksi aktor dalam mempromosikan demokrasi pada tingkat masyarakat.
- 2) *Transparansi* menilai sejauh mana aktor-aktor MS mempraktekkan sekaligus mempromosikan transparansi. Indikator-indikatornya mencakup; korupsi dalam MS, transparansi keuangan dalam MS, dan aksi-aksi aktor MS mempromosikan transparansi pada tingkat masyarakat.
- 3) *Toleransi* menilai keseimbangan antara kekuatan toleran dan intoleran dalam MS, juga tingkat keterlibatan MS dalam

meningkatkan toleransi dalam masyarakat luas. Indikator-indikatornya mencakup; toleransi di dalam MS dan aksi-aksi aktor MS dalam mempromosikan toleransi kepada masyarakat luas

- 4) *Anti kekerasan* menilai kehadiran kekuatan kekerasan di dalam MS, sekaligus menilai usaha-usaha aktor-aktor MS untuk mempromosikan cara-cara non-kekerasan pada tataran individu, keluarga, dan publik. Indikator-indikatornya mencakup; anti kekerasan di dalam MS dan aksi-aksi aktor MS dalam mempromosikan anti kekerasan dan perdamaian
- 5) *Kesetaraan gender* menilai penerapan kesetaraan gender di lingkup internal OMS, sekaligus usaha-usaha OMS untuk mempromosikan nilai ini pada publik. Indikator-indikatornya mencakup; kesetaraan gender di arena MS, praktek-praktek kesetaraan gender di dalam

OMS dan aksi-aksi mempromosikan kesetaraan gender di dalam masyarakat luas.

- 6) *Pemberantasan kemiskinan* menilai sejauh mana aktor-aktor MS terlibat dalam menangani isu kemiskinan dan mempromosikan kebijakan yang berpihak pada orang miskin. Indikator-indikatornya mencakup; aksi-aksi aktor MS menganggulangi kemiskinan dan melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada orang miskin
- 7) *Keberlanjutan lingkungan* menilai sejauh mana aktor-aktor MS menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan kepada publik. Indikator-indikatornya mencakup; aksi-aksi aktor MS menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.

- **Dimensi Dampak**



Dimensi dampak mengukur dampak keberadaan masyarakat sipil terhadap kehidupan warganegara dan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini, mengadopsi gagasan luas dari dampak, yang merujuk tidak hanya pada hasil akhir (misalnya berapa banyak pengaruh MS terjadi pada area khusus), tetapi juga pada proses (misalnya bagaimana keterlibatan MS secara aktif dalam area itu). Dimensi dampak terdiri dari 5 subdimensi dan 16 indikator.

- 1) *Mempengaruhi kebijakan publik* menilai tingkat keaktifan dan keberhasilan MS dalam mempengaruhi kebijakan publik, misalnya dalam hal; kebijakan atas

prioritas pembangunan wilayah, proses penyusunan anggaran, dan sebagainya. Indikator-indikatornya mencakup; tingkat pengaruh aktor-aktor MS dalam kebijakan publik.

- 2) *Akuntabilitas Negara dan Pasar* menilai kemampuan aktor-aktor MS memantau sektor negara dan pasar, dan mendorong sektor-sektor itu lebih bertanggung-gugat. Indikator-indikatornya mencakup; sejauhmana aktor-aktor MS mendesak—kan terwujudnya tanggung jawab Negara dan Pasar.
- 3) *Merespon kepentingan sosial* menilai efektifitas OMS sebagai “wakil” atau “artikulator” dari kepentingan publik. Indikator-indikatornya mencakup; sejauhmana aktor-aktor masyarakat sipil memberikan tanggapan terhadap isu-isu sosial yang berkembang, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor MS.
- 4) *Memberdayakan warga negara* menilai peran MS dalam memperbesar/ memperluas “pilihan-pilihan” yang bisa diambil warga negara, sekaligus dalam meningkatkan kapasitas warga negara

dalam melakukan kontrol atas keputusan (atau kebijakan) publik yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Indikator-indikatornya mencakup; memberikan informasi/mendidik warga Negara, membangun kapasitas untuk aksi bersama, memberdayakan masyarakat terpinggirkan, memberdayakan perempuan, membangun modal social, mendorong penyediaan lapangan pekerjaan.

- 5) *Memenuhi kebutuhan masyarakat* menilai peran MS dalam berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak dari, terutama, kelompok miskin dan masyarakat yang terpinggirkan atau termarginalisasikan. Aspek bahasan dalam sub dimensi ini mencakup kinerja MS untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung (memberi pelayanan langsung pada rakyat yang miskin atau terpinggirkan), dan untuk melobby pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan sosial. Indikator-indikatornya mencakup; melakukan lobby untuk penyediaan pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak secara langsung, dan

memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok terpinggirkan.

2.5. Bagaimana Melakukan Penilaian/ Skoring?

Penilaian IMS menggunakan sistem skoring. Skor IMS menggunakan skala 4 (empat), yaitu 0, 1, 2, dan 3. Skor tersebut memunculkan 4 selang yang diberi makna sebagai berikut:

SELANG PENILAIAN IMS

0,00 – 0,75 = sakit

0,76 – 1,50 = kurang sehat

1,51 – 2,25 = cukup sehat

2,26 – 3,00 = sehat

Proses penilaian IMS adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum proses penilaian, disampaikan secara ringkas tahapan proses yang telah dilalui sebelumnya, memahami bersama kerangka analisis “Intan IMS” yang menunjukkan dimensi – subdimensi, prinsip-prinsip penilaian dan cara penilaian.
- 2) Melakukan penilaian secara partisipatif dengan menggunakan lembar penilaian IMS yang di dalamnya berisi rumusan indikator-

indikator pada subdimensi dan dimensi, skor penilaian (skala 0 – 3) dan pernyataan arti dari masing-masing skor. Setiap peserta melakukan penilaian mandiri dengan melingkari angka (skor) di setiap indikator (ada 74 indikator) yang isi pernyataannya sesuai dengan situasi yang ia ketahui.

- 3) Semua lembar penilaian yang telah diisi peserta diinput ke *software* pengolahan data (menggunakan *Microsoft Excel*).
- 4) Hasil input akan keluar diagram hasil penilaian, yaitu intan IMS, dan dimensi dan subdimensi.

2.6. Siapa Saja Partisipan Pengukuran IMS?

Dari serangkaian kegiatan lokakarya yang dilakukan YAPPIKA, partisipan yang terlibat dalam pengukuran IMS terdiri dari individu-individu yang berasal dari 3 (tiga) sektor, yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS), Negara, dan sektor bisnis (pasar). Jumlah peserta lokakarya kurang lebih 50 orang dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Peserta dari sektor OMS diupayakan mewakili berbagai jenis/spektrum OMS yang ada di wilayah bersangkutan. Peserta dari

sektor Negara terwakili dari Pemerintah Daerah, DPRD dan lembaga quasi negara yang ada di wilayah bersangkutan (misalnya Ombudsman, Komisi Informasi Daerah). Peserta dari sektor swasta (pasar) diupayakan dari perusahaan yang memiliki kantor di wilayah bersangkutan, media massa dan perguruan tinggi.

2.7. Pentingnya Keterwakilan Dalam Pengukuran IMS

Penentuan sebaran peserta dan keterwakilan unsur-unsur yang terlibat dalam lokakarya pengukuran IMS, ditentukan berdasarkan kisaran komposisi sebagai berikut:

- 1) Peserta dari unsur OMS, beragam komposisinya, sebagai contoh:
 - OMS Komunitas/organisasi warga. Jumlahnya sekitar 40%, atau kurang lebih 20 orang.
 - OMS LSM. Jumlahnya sekitar 20%, atau kurang lebih 10 orang.
 - OMS Non LSM, misalnya agama. Jumlahnya sekitar 8%, atau kurang lebih 4 orang;

- 2) Peserta/stakeholder kunci dari unsur pemerintah (eksekutif), misalnya: Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan atau dinas terkait lainnya. Jumlah sekitar 8%, atau kurang lebih 4 orang;
- 3) Peserta/stakeholder kunci dari unsur pemerintah (legislatif): DPRD. Jumlah sekitar 8%, atau kurang lebih 4 orang;
- 4) Peserta /stakeholder kunci dari unsur swasta dan media, misalnya: Organda, pengusaha, wartawan/pengurus koran/tabloid/majalah, wartawan/penyiar radio. Jumlahnya sekitar 8%, atau kurang lebih 4 orang;
- 5) Peserta /stakeholder kunci dari unsur perguruan tinggi, misalnya: Universitas, Sekolah Tinggi. Jumlahnya sekitar 8%, atau kurang lebih 4 orang.

Mengingat banyaknya OMS dan beragamnya jenis/spektrum OMS, maka peserta yang dipilih dari unsur OMS, diberlakukan seleksi dengan kriteria khusus:

- 1) Mewakili jenis/spektrum OMS yang ada di wilayah setempat;
- 2) Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OMS di mana ia menjadi

- pimpinan atau anggotanya, atau aktif berorganisasi;
- 3) Memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup baik tentang beberapa isu yang berkembang di lingkup aktivitasnya atau di lingkungan sosial tempat tinggalnya;
 - 4) Memiliki kemampuan berbicara dengan artikulasi yang cukup baik di dalam forum diskusi lintas stakeholder.

2.8. Apa Informasi Pendukung yang Di butuhkan?

Penilaian IMS kabupaten/kota dilakukan dengan basis persepsi. Oleh sebab itu, dalam melakukan penilaian, selain pengalaman pribadi peserta, dibutuhkan sejumlah informasi penunjang , antara lain:

- 1) Informasi atau data yang berkaitan dengan hasil penelitian kondisi masyarakat sipil;
- 2) Informasi atau data tentang hasil pemetaan OMS;
- 3) Informasi dari narasumber dalam rangka IMS tersebut yang tertuang dalam materi/ makalah;

- 4) Hasil diskusi dari lokakarya yang dilakukan sebelumnya, termasuk hasil-hasil lokakarya komunitas.

2.9. Bagaimana Proses Pengukuran IMS?

Langkah-langkah pokok memroses pengukuran IMS di kabupaten/kota terdiri dari:

1. Mendiskusikan kondisi kabupaten: sebelum lokakarya pengukuran IMS, dilakukan lokakarya komunitas. Lokakarya ini bertujuan menggali informasi-informasi mengenai dinamika Masyarakat Sipil di desa-desa yang dapat mendukung gambaran kondisi terkini di lingkup kabupaten/ kota. Selain itu bertujuan untuk mempersiapkan peserta dari komunitas warga (dampingan OMS maupun program pemerintah) guna mengikuti tahapan lokakarya IMS berikutnya. Proses ini disiapkan agar peserta dari komunitas warga lebih siap tampil, 'bersuara', dan memiliki pemahaman tentang konsepsi masyarakat sipil dan alat IMS yang akan digunakan untuk mengukur status kesehatan masyarakat sipil kabupaten/kotanya;

2. Pendefinisian Masyarakat Sipil: membahas tentang apa itu masyarakat sipil (konsepsi MS), ditinjau dari realitas keberagaman aksi-aksi warga negara dan berbagai kelompok masyarakat yang ada saat ini di sebuah wilayah (mengidentifikasi OMS);
3. Menyepakati alat analisis: merupakan ulasan dan kesepakatan terhadap substansi intan masyarakat sipil (dimensi, subdimensi, dan indikator-indikator pengukuran di tiap dimensi) yang menjadi basis atas idealisasi fungsi dan peran-peran masyarakat sipil atau visi ideal yang dikembangkan bersama tentang masyarakat sipil;
4. Melakukan penilaian: atas status masyarakat sipil saat ini dibandingkan dengan visi ideal yang diharapkan dari masyarakat sipil (menilai realitas masyarakat sipil melalui penilaian individual atas tiap-tiap indikator yang disepakati);
5. Mendiskusikan hasil penilaian: _menginterpretasikan (memberi makna) atas penilaian yang diberikan oleh masing-masing individu, memberi contoh dan menyimpulkan status atau tingkat kesehatan masyarakat sipil saat ini;

6. Merumuskan rekomendasi agenda utama: menyepakati agenda-agenda utama yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan status atau “menyehatkan” masyarakat sipil.

2.10. Siapa Saja yang Dapat Melaksanakan IMS?

Alat IMS ini diperkenalkan dan dilaksanakan oleh dan untuk OMS di tingkat nasional maupun daerah (kabupaten/kota), dan secara aktif melibatkan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya kepada stakeholder yang luas termasuk pemerintah, lembaga donor, akademisi, dan publik luas. Oleh sebab itu, pihak yang dapat melaksanakan IMS adalah para aktor masyarakat sipil (OMS) dan stakeholder kunci lainnya baik dari sektor negara dan pasar yang memiliki kepedulian pada upaya-upaya penguatan masyarakat sipil.

Bagian 3

MANFAAT INDEKS MASYARAKAT SIPIL

Sebagai sebuah alat, IMS dan hasil-hasilnya diharapkan dapat bermanfaat, baik langsung maupun tidak langsung, bagi semua pihak (bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor bisnis/swasta) dalam mendorong perubahan kondisi dan pemberdayaan kabupaten/kota ke arah lebih baik. Maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah:

3.1. Manfaat IMS bagi sektor swasta

- Dapat dijadikan panduan dalam penyusunan kerangka *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan
- Membangun strategi perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah dalam rangka perbaikan lingkungan hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aksi-aksi filantropi.

3.1. Manfaat IMS bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Dapat dijadikan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, lima tahunan dan dua puluh lima tahun ke depan. Sasaran pembangunan pada dasarnya adalah membangun masyarakat sipil yang kuat dan tidak sebatas sebagai alat pembangunan.
- Dapat dijadikan bahan dalam menyusun strategi pelibatan para aktor masyarakat di tingkat kabupaten/kota dan pengawalan atas implementasi strategi yang telah disusun
- Sebagai bahan refleksi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dicapai.

3.3. Manfaat IMS bagi OMS

- Proses IMS menghasilkan potret, dinamika dan status masyarakat sipil yang berkembang di kabupaten/kota. Hasil ini dapat dimanfaatkan untuk memahami bersama-sama realitas yang ada dan menjajaki upaya-upaya nyata yang dapat dilakukan untuk memperbaiki potret masyarakat sipil dan mendukung cita-cita masyarakat di tingkat kabupaten;

- Proses IMS menghasilkan identifikasi sejumlah aset/kekuatan (maupun kelemahan/tantangan) yang dimiliki warga, organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah lokal. Hal ini bermanfaat untuk pengembangan Tata Kepemerintahan Lokal yang Demokratis (TKLD);
- Proses IMS berupaya mengapresiasi berbagai program pembangunan yang turut memberi perubahan dalam bentuk penguatan pada institusi-institusi sosial dan pemerintahan. Proses IMS menghasilkan identifikasi wilayah-wilayah penting untuk pengembangan/ penguatan masyarakat sipil. Hal ini bermanfaat dalam mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian bagi upaya penguatan masyarakat sipil dan perbaikan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- Proses IMS berupaya mengapresiasi peran para pihak, yakni pemerintah daerah, swasta dan LSM telah banyak melakukan kerjasama, bersinergi, memperluas jaringan dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelayanan yang baik bagi warganya;
- Proses IMS berupaya mempercepat tumbuh kembangnya semangat warga yang

mempunyai perhatian, meningkatkan dan kontribusinya pada pembangunan di daerahnya hingga menjadi aktor perubahan untuk mendorong gerakan perubahan yang lebih luas;

- Terumuskannya rekomendasi dan agenda aksi bersama untuk memperkuat masyarakat sipil dan memperkuat lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang sehat.

Bagian 4

BELAJAR DARI PENGALAMAN

Sebagai catatan akhir, untuk membumikan IMS dalam aktifitas keseharian kita, mari kita lihat beberapa tantangan dan pembelajaran yang diperoleh dari proses IMS.

4.1. Apa Saja Pengalaman Yang Diperoleh Yappika ?

Berdasarkan pengalaman Yappika melakukan pengukuran IMS dapat dipetik beberapa pembelajaran, antara lain:

- Pemanfaatan IMS untuk melihat kondisi yang terjadi di sebuah kabupaten memberikan gambaran yang komprehensif atas realitas yang ada;
- Penggunaan IMS ini memandu semua pihak untuk mengeksplorasi berbagai kenyataan

yang terjadi melalui diskusi-diskusi antar pihak (masyarakat, OMS maupun stakeholder kunci) atas dasar informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Selain terjadi sharing, terjadi juga koreksi atas sebuah informasi yang disampaikan satu pihak oleh pihak lainnya. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan berbasiskan pada situasi/kondisi yang telah terkumpul melalui diskusi-diskusi intensif yang berlangsung, utamanya pada saat interpretasi atas nilai-nilai yang diperoleh dalam pengukuran. Bisa dikatakan bahwa secara kualitatif rekomendasi yang dihasilkan relevan dengan persoalan yang dihadapi;

- Lokakarya IMS dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi/situasi Masyarakat Sipil di sebuah kabupaten tertentu melalui proses penilaian dan refleksi atas MS saat ini (analisis kelemahan dan kekuatan MS), membangun visi bersama tentang MS, serta mengembangkan strategi untuk mendorong perubahan yang positif;
- IMS merupakan salah satu wahana memberdayakan Masyarakat Sipil dan stake-

holder kuncinya dengan memberikan kesempatan berdialog dan mengembangkan jaringan diantara mereka;

- IMS merupakan salah satu gerakan alternatif, memperkuat kapasitas MS (melalui diskusi dan dialog mendalam atas nilai-nilai yang seharusnya diyakini, dipraktekkan, dan dipromosikan oleh MS serta dialog atas dampak yang ditimbulkan dari berbagai rangkaian kegiatan MS) sehingga mampu memenuhi peran-peran positifnya dalam mendorong tata pemerintahan yang baik.

4.2. Apa Tantangan Penggunaan IMS?

Tantangan dalam melaksanakan pengukuran kondisi MS kabupaten/kota sebagai berikut:

- Pendefinisian (konsep) masyarakat sipil yang beragam dan masih terus diperdebatkan, oleh karena itu penting adanya pendokumentasian atas perdebatan yang berlangsung sehingga menjadi pengetahuan yang spesifik atas isu masyarakat sipil;
- Seringkali terjadi kerancuan ketika membahas 'realitas' masyarakat sipil dengan 'kondisi ideal' yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena cara pandang setiap

aktor pelaku pembangunan di daerah tidak sama dalam memandang kondisi ideal. Oleh karena itu IMS mewadahi kerancuan ini dengan mempertemukan seluruh aktor dan berusaha membincangkan realitas dalam bingkai tema yang sama;

- Khusus untuk *perception based* (basis persepsi), masih muncul keraguan di beberapa peserta tentang indeks berbasis persepsi, khususnya menyangkut keabsahan (validitas) hasil penilaian yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan dari orang-orang yang diundang dalam lokakarya.

4.3. Apa yang Penting Dilakukan ke Depan?

Penggunaan IMS secara berkelanjutan, khususnya di tingkat kabupaten, telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, antara lain, menguatnya peran-peran dan kontribusinya masyarakat sipil, meningkatnya pertautan OMS dengan pemerintah daerah, dan lebih berdayanya kelompok-kelompok warga dalam menyuarakan kepentingan dan haknya kepada pemerintah. Oleh karena itu, apa yang penting dilakukan ke depan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sipil? Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- Penting untuk terus melakukan penyebarluasan hasil-hasil IMS sebagai sebuah alat untuk meningkatkan pertautan antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah;
- OMS di kabupaten/kota perlu lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi hasil-hasil IMS dalam agenda pembangunan;
- Selain itu hal yang lebih penting adalah menyediakan ruang bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil dan pada saat bersamaan melakukan penguatan kelompok-kelompok warga.
- Di tingkat nasional, pemerintah mengakui masyarakat sipil sebagai salah satu aktor pembangunan selain pemerintah dan sektor swasta. Tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yaitu bagian penguatan masyarakat sipil termasuk dalam Bidang Politik.
- Mendorong pemerintah untuk menggunakan IMS sebagai alat ukur perkembangan demokrasi di tingkat nasional hingga daerah.

DAFTAR BACAAN

Civicus (2004). Civicus Civil Society Index. Toolkit Implementation Phase 2003-2004. Penerbit CIVICUS. Washington.

Fitri, Fransisca (2011), et al. Indeks Masyarakat Sipil, Profil 16 Kabupaten/Kota: Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Keperintahan Lokal yang Demokratis. Yappika. Jakarta.

Ibrahim, Rustam (2006). Draft Country Report: Masyarakat Sipil Indonesia 2006. Suatu Laporan Mengenai Indeks Masyarakat Sipil untuk Republik Indonesia. Penerbit Yappika. Jakarta.

_____ (2007). Indeks Masyarakat Sipil: Jalan (Masih) Panjang Menuju Masyarakat Sipil. Penerbit Yappika. Jakarta.

_____ (2002). *Beberapa Konsep Masyarakat Sipil dan relevansinya dengan peran Organisasi Masyarakat Sipil*, makalah Lokakarya Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil di Indonesia, Purwakarta, 16-17 September 2002

Mati, Jacob M. et al. (2010). Assessing and Strengthening Civil Society Worldwide, An updated programme description of the CIVICUS Civil Society Index: Phase 2008 to 2010. CIVICUS.

Suryaningati, Abdi (2012). Menilai Status Masyarakat Sipil: Sebuah Panduan Memahami Indeks Masyarakat Sipil 2012. Yappika. Jakarta.

**Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II**

Australian Aid Managed by IDSS on behalf of the Australian Government